

Outline Journal of Economic Studies

Journal homepage: <http://outlinepublisher.com/index.php/OJES>

Research Article

The Role of Government in Poverty Alleviation in North Sumatra

(Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Sumatera Utara)

Widia Suryantina Br Nainggolan^{1*}, Delvia Irene Teresia Haloho², Artha Nauli Sitohang³

^{1, 2, 3}Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Correspondence: widiasuryantina12345@gmail.com

Keyword:	Abstract
Poverty Medan City Socio-Economic Inequality	Poverty is a completely limited situation that occurs not at the will of the person concerned. A population is said to be poor if it is marked by a low level of education, productivity employment, income, health and nutrition as well as welfare, which shows a circle of powerlessness. The most lagging province in Sumatra is North Sumatra. According to the Central Statistics Agency, there will be 1,356,720 poor people in North Sumatra in 2020. In terms of poverty, North Sumatra ranks fourth out of 34 Indonesian provinces according to the Central Statistics Agency in 2020, after East Java, West Java and Central Java, as can be seen in the chart below. By using qualitative research techniques, the main data used in this research is converted into secondary data from various sources. Direct Cash Assistance (BLt), NonCash Food Assistance (Bpnt), and Social Assistance are all based on Law no. Project 5 was implemented by the Regional Government of Medan City in 2015. These include housing assistance and a Business School.

PENDAHULUAN

Supriatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan (Nur, 2022). Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal (Nainggolan, 2020).

Sumatera Utara adalah provinsi Sumatera yang paling parah atau tertinggal. Di Sumatera Utara, pada tahun 2020 akan ada 1.356.720 orang miskin, menurut Badan Pusat Statistik (Manullang, 2024) (Tambunan, 2024). Selain itu, grafik di bawah ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara, dari 34 provinsi di Indonesia, menempati urutan keempat dalam proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan, di bawah provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah (Badan Pusat Statistik, 2020). Hasil ini memperjelas bahwa perjuangan melawan kemiskinan perlu dimajukan sejauh mungkin (Lubis, 2019). Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan

harus dilakukan secara terpadu, terpadu, dan menyeluruh, serta memperhatikan berbagai elemen kehidupan Masyarakat (Amalia, 2017). Tingkat dan tingkat keparahan kemiskinan di provinsi ini perlu diperhitungkan (Deo, 2023).

Untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan rumah tangga miskin, pemerintah Sumatera Utara terus meningkatkan berbagai program penanggulangan kemiskinan (Sitio, 2024). Menurut Todaro (2015), terdapat hubungan antara tingkat upah yang rendah karena kemelaratan, variasi upah antar jaringan, dan pembangunan di bidang kesejahteraan umum dan persekolahan yang miskin dan tidak ideal. Untuk memperjelasnya, kita perlu mengatasi akar penyebab kemiskinan. Dengan meningkatkan investasi dan produk nasional bruto, serta dengan memaksimalkan peningkatan pendidikan dan fasilitas kesehatan, kemiskinan dapat dikurangi (Hakim, 2024).

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagai kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan kesejahteraan rakyat (Ramadhani, 2022) (Rambe, 2019).

Pengertian kemiskinan

Badan pusat statistik BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar—baik kebutuhan pangan maupun nonpangan—pada standar minimum (Aldino, 2021). Sebaliknya, Cahyat (2004) UNDP mendefinisikan kemiskinan sebagai ketimpangan untuk memperluas pilihan hidup termasuk mengidentifikasi non partisipasi dalam perumusan kebijakan publik sebagai indikator kemiskinan.

Kemiskinan (integrative concept) memiliki lima (5) dimensi yaitu:

1. Kesulitan (proper)
2. kelemahan (powerless)
3. Kerentanan dalam menghadapi situasi darurat (state of emergency)
4. Ketergantungan (dependence)
5. Keterasingan (isolation) – baik itu secara geografis maupun sosiologis.

Menurut Rejekiingsih (2011), Kemiskinan adalah suatu jenis kondisi yang menekankan pada pemeliharaan standar hidup minimum, terutama dalam hal konsumsi dan pendapatan. Selain itu, kemiskinan merupakan masalah multisektoral, multiregional, dan multigenerasi yang memerlukan penanganan terpadu, berkelanjutan, dan pendapatan inklusif harus dibenahi (Sardini, 2022). Sulit untuk menilai kualitas hidup seseorang karena kemiskinan umumnya didefinisikan sebagai ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka akan barang (Sitanggang, 2024).

Penyebab Kemiskinan

Berikut ini beberapa sumber kemiskinan menurut Nasikun, yaitu:

1. Policy induces processes, (Politik memprovokasi proses) yang merupakan suatu proses kemiskinan abadi yang diciptakan oleh penerapan kebijakan yang mencakup, tetapi sebenarnya mempertahankan, kebijakan antikemiskinan.
2. Socio economic dualism, (Dualisme sosial ekonomi) yang merupakan, negaranegara bekas jajahan terkena kemiskinan akibat pola produksi colonial.
3. Population growth, (Pertumbuhan populas). Perspektif berdasarkan teori Malthus bahwa pertumbuhan populasi menyerupai deret geometri, sedangkan pertumbuhan makanan menyerupai deret aritmetika
4. Resources management and the environment, (pengelolaan sumberdaya dan lingkungan). Lingkungan hidup memiliki unsure kesalahan pengelolaan sumberdaya alam.
5. Natural cycles and processes, Kemiskinan muncul melalui siklus dan proses alam, seperti hidup di lahan kritis.

Selain itu, salah satu contohnya adalah "Penyebab kemiskinan menurut Hartomo and Aziz dalam Dadan Hudyana" (2009:2829) sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan yang relative rendah: Seseorang dengan tingkat pendidikan yang relative rendah mungkin tidak memiliki keterampilan hidup tertentu. Peluang untuk memasuki dunia kerja mungkin terbatas jika Anda tidak berpendidikan.
2. Malas bekerja karena sikap malas dapat membuat orang apatis atau acuh tak acuh terhadap pekerjaannya dan kurang motivasi.
3. Sumber daya alam yang terbatas, Orang akan menjadi lebih miskin ketika sumber daya alam ini tidak lagi berfungsi sebagai sarana penghidupan karena ketersediaannya yang terbatas.
4. Lapangan pekerjaan yang terbatas, Kemiskinan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan karena tidak banyak kesempatan kerja. Orang miskin tidak mungkin mampu menciptakan lapangan kerja baru karena mereka kekurangan sumber daya dan keahlian untuk melakukannya.
5. Modal terbatas, kekurangan modal, orang miskin mungkin tidak dapat memperoleh alat dan bahan yang diperlukan atau mempelajari keterampilan baru untuk menghasilkan pendapatan.

Selain itu, menurut Suryadiningrat, ketidakmampuan manusia untuk berpegang pada norma, kebenaran, kejujuran, dan keadilan bagi umat beragama menjadi penyebab utama kemiskinan (Siregar, 2020). Hal inilah yang merugikan individu dan mempengaruhi orang lain.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, dimana data sekunder dari penelitian terdahulu atau sumber lain diolah dari data primer dalam penelitian kualitatif. Tempat penelitian ini berlokasi di kota Medan, provinsi Sumatera Utara, ini bertujuan untuk memperjelas peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data dari buku, penelitian sebelumnya, internet, dan sumber lain, serta data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), digunakan dalam metode pengumpulan data penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Interpretasi Output Uji Regresi Linear dengan Eviews

Tabel 1
Hasil Output Uji Regresi Linear dengan Eviews

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.267052	0.189218	-1.411343	0.1696
X1	-0.077598	0.098077	-0.791194	0.4357
X2	1.132038	0.098900	11.44630	0.0000
R-squared	0.999704	Mean dependent var		42.86967
Adjusted R-squared	0.999682	S.D. dependent var		36.96371
S.E. of regression	0.658856	Akaike info criterion		2.098016
Sum squared resid	11.72046	Schwarz criterion		2.238135
Log likelihood	-28.47024	Hannan-Quinn criter.		2.142841
F-statistic	45625.72	Durbin-Watson stat		1.797727
Prob(F-statistic)	0.000000			

T Parsial

T parsial ditunjukkan dengan nilai "t-Statistics". Contoh di atas adalah nilai t parsial X1 sebesar - 0,791194. Nilai ini kita bandingkan dengan t tabel. namun agar proses bisa cepat, kita dapat melihat nilai p value dari t parsial. jika nilainya < batas kritis, misal < 0,05 maka menerima H1 atau yang berarti variabel X1 berpengaruh secara parsial di dalam model terhadap variabel response (Y). Contoh di atas adalah nilai p value t parsial X1 adalah 0,00008 dimana < 0,05 sehingga menerima H1.

Koefisien Beta

Koefisien beta dalam eviews ditunjukkan dengan label “coefficient“. Koefisien beta adalah nilai prediksi sebuah variabel di dalam model terhadap variabel response. Misal di atas nilai koefisien beta X1 adalah - 0,077598 yang berarti X1 dapat menjelaskan Y sebesar 77,598% atau dapat diartikan: setiap perubahan satu satuan X1 dapat mengakibatkan perubahan pada Y sebesar 77,598%.

Koefisien Determinasi Berganda

Nilai koefisien determinasi berganda dalam eviews sama seperti halnya dengan aplikasi lainnya, yaitu diberi label R-Squared. Dalam contoh ini sebesar 0,999704 yang berarti sekumpulan variabel predictor di dalam model dapat menjelaskan variabel response sebesar 99,9704%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti.

Adjusted R Square

Nilai adjusted R Square artinya nilai R Square yang telah terkoreksi oleh nilai standar error. Dalam contoh ini, nilai adjusted r square sebesar 0,999682. Sedangkan nilai standar error model regresi 0,658856 ditunjukkan dengan label S.E. of regression. Nilai standar error ini lebih kecil dari pada nilai standar deviasi variabel response yang ditunjukkan dengan label “S.D. dependent var” yaitu sebesar 36,96371 yang dapat diartikan bahwa model regresi valid sebagai model prediktor.

Uji Simultan

Uji simultan dalam eviews diperlihatkan dengan hasil nilai Uji F seperti layaknya jika kita menganalisis menggunakan aplikasi SPSS. Namun dalam eviews diberi label F-statistics. Dalam tutorial ini nilai F sebesar 45625,72 dengan p value sebesar 0,00000 dimana $< 0,05$ atau batas kritis penelitian, sehingga dapat disimpulkan menerima H1. Menerima H1 dalam uji simultan berarti bahwa variabel bebas secara serentak mempengaruhi secara bermakna variabel terikat.

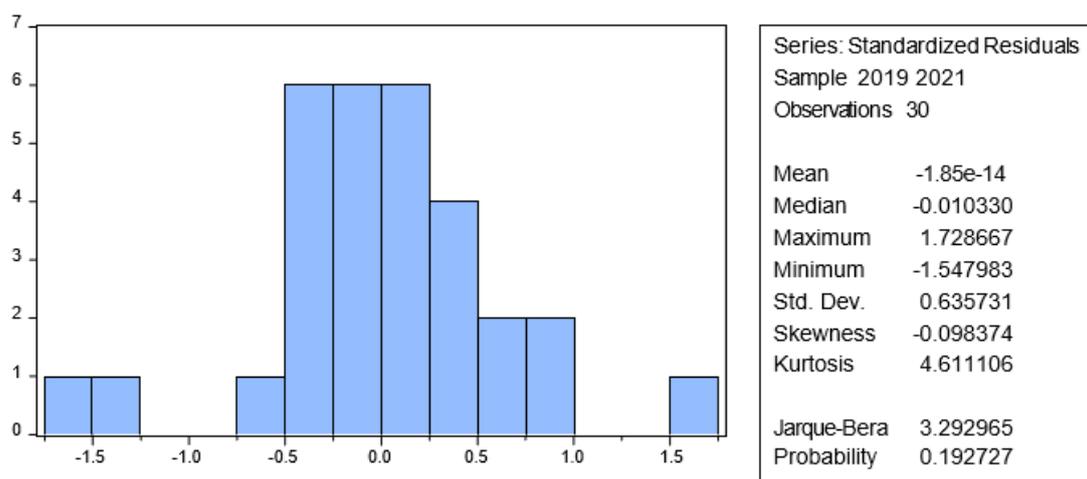
B. Uji Multikolinearitas

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

	Y	C	X1	X2
Y	1.000000	NA	0.999134	0.999849
C	NA	NA	NA	NA
X1	0.999134	NA	1.000000	0.999378
X2	0.999849	NA	0.999378	1.000000

Hasil pengujian korelasi antara X1 dengan X2 sebesar 0.999134, Y dengan X2 0.999849, X1 dengan X2 sebesar 0.999378. Hasil ini tidak ada korelasi yang tinggi (> 0.8) sehingga tidak terindikasi terjadi multikolinieritas pada model.

C. Uji Normalitas



Gambar 1
Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas residual di atas adalah: nilai jarque bera sebesar 3.292965 dengan p value sebesar 0.192727 dimana > 0.05 sehingga terima H_0 atau yang berarti residual berdistribusi normal.

Ketentuan Pasal 14 No. Upaya yang dilakukan pemerintah kota Medan untuk mengentaskan kemiskinan pada tahun 2015 dituangkan dalam 1 Peraturan Daerah Kota Medan: sebagai berikut:

1. Bantuan pangan

Bantuan pangan yang telah di salurkan oleh Pemerintah setempat adalah:

- a. BANSOS (Bantuan sosial) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bantuan sosial adalah penyaluran bantuan kepada masyarakat secara sporadis dan selektif baik berupa uang maupun barang. Pemerintah memberikan 20kilogram bijibijian, 2kilogram gula, dan 1 liter air sebagai bantuan kesejahteraan.
 - b. BLT (Bantuan langsung tunai) Pemerintah menawarkan bantuan tunai kepada masyarakat miskin melalui program bantuan tunai. BLT mendapatkan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. Sejak pandemi Covid19, 300.000 orang datang setiap bulan. Bagi mereka yang membutuhkan yang tidak mendapatkan PKH atau BPNT, BLT bisa menjadi pilihan
 - c. BPNT (Bantuan pangan non tunai) Setiap bulan, pemerintah memberikan bantuan sembako nontunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui rekening elektronik yang mereka gunakan untuk membeli kebutuhan pokok dari eWarong KUBE PKH (warung gotong royong elektronik). DanBank Mandiri, HIMBARA, BTN, BNI, dan BRI. dengan Rp. total dana. Donatur program BPNT dapat menukarkan 200.000 Rupiah dengan 15 kg beras, satu butir telur, dan satu ekor ayam.
2. Bantuan kesehatan PKH kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang tersedia. Tujuan dari program PKH adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan menurunkan angka gizi buruk pada balita. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, No. PUSTU (Puskesmas Pembantu) merupakan satusatunya jaringan penyedia layanan kesehatan di Nelayan Indah yang mengikuti pedoman yang dituangkan dalam 903/Menkes/Per/V/2011 tentang penyelenggaraan skema jaminan kesehatan masyarakat. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan salah satu komponen peserta PKH di bidang kesehatan, dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. bayi, ibu hamil, lansia, dan anak berkebutuhan khusus.

3. Bantuan pendidikan

PKH juga memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat untuk membantu membesarkan anak-anak kita. Bantuan Pendidikan PKH diberikan setiap tiga bulan sekali melalui PKH Pendidikan, dan sektor pendidikan meningkatkan akses anak terhadap sumber daya pendidikan. Tingkat pendidikan anak menentukan pendanaan.

4. Bantuan perumahan

Kompleks perumahan masyarakat tetap kumuh. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai dan sekitar rel kereta api. Dengan latar belakang tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman merenovasi rumah untuk membantu masyarakat miskin yang masih mengungsi.

5. Bantuan peningkatan dan keterampilan

Keterampilan adalah program pendidikan yang dirancang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar guna membantu mereka tumbuh secara intelektual. Menjahit adalah kemajuan teknologi yang diterima masyarakat di Medan, Indonesia, dari pemerintah adalah bentuk pendidikan yang masyarakat menerima dari pemerintah untuk memperoleh sumber keuangan yang mereka butuhkan untuk bekerja mencari nafkah.

6. Bantuan modal usaha

Kota Nelayan Indah, Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dijalankan oleh UMKM dengan aset senilai Rp. 2.400.000, diberikan uang oleh pemerintah (Rp. Dua juta empat ratus ribu).

7. Bantuan Keamanan

Untuk melindungi masyarakat, pemerintah membentuk masyarakat hukum dan ketertiban yang dikenal sebagai Kamtibmas. Namun, pemerintah gagal menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 5 perda kota medan tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Pendataan sasaran program yang tidak tepat
- b. Masyarakat yang tidak terlalu aktif
- c. Masyarakat menggunakan bantuan secara konsumtif Berikut merupakan peranan pemerintah daerah:
 1. Pemerintah daerah dapat memilih untuk berinvestasi di perusahaan publik dan swasta. Penyertaan modal dapat ditingkatkan, dikurangi, dialihkan, atau dijual kepada bisnis lokal. Peraturan daerah yang meniru undang-undang dan peraturan mengatur pendirian, penggabungan, pengalihan kepemilikan, dan pembubaran BUMD, dan lokal pemerintah dapat memiliki BUMD.
 2. Untuk mendanai kebutuhan khusus, pemerintah daerah dapat membangun cadangan sumber daya yang tidak dapat mereka sediakan sepanjang tahun. Peraturan pemerintah menetapkan pedoman untuk cadangan lokal.
 3. Pemerintah daerah wajib menyampaikan pospos surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Keuangan setiap enam bulan selama tahun anggaran berjalan. Pemerintah daerah mengajukan usulan revisi perda beserta justifikasi dan dokumen pendukungnya ke APBD.
 4. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membentuk badan yang terencana dan terintegrasi untuk mengelola pembangunan pedesaan. Ketika pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, mereka memberi mereka lebih banyak kekuatan.

Selain itu, dalam kerangka desentralisasi, praktik cogovernment, dan desentralisasi, peran pemerintah daerah yang diharapkan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom adalah:

1. Desentralisasi.

Dalam tatanan negara kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi juga sering disebut sebagai desentralisasi politik, yaitu persetujuan semua kekuasaan yang semula ditunjuk oleh pemerintah pusat menjadi kekuasaan pemerintahan daerah yang menjalankan pemerintahan untuk mengendalikan dan mengawasi pemerintahan. Usaha metode desentralisasi politik di mana individu dan saluran perwakilan pemerintah tertentu berfungsi dalam batasbatas wilayah mereka.

2. Dekonsentrasi.

Dekonsentrasi, atau melaksanakan dan menunjang tugas dengan melimpahkan wewenang dari pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah atau kepada pejabat vertikal di daerah tertentu. Misalnya melaksanakan segala tugas dari pemerintahan kepada kabupaten dan desa, pemerintahan negara bagian kepada prefektur atau kota atau desa, dan prefektur atau kota atau desa kepada desa

untuk melaksanakan tugas tertentu. Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Mustopadidjaja (2003) menegaskan bahwa tiga pengaruh utama pada pemerintahan adalah struktur pemerintahan, birokrasi, dan prosedur administrasi. Instansi pemerintah perlu disosialisasikan dan diberi wewenang lebih untuk memastikan bahwa struktur organisasi dan prosedur administrasi memenuhi persyaratan. dan persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

KESIMPULAN

kemiskinan adalah suatu jenis kondisi yang menekankan pada pemeliharaan standar hidup minimum, terutama dalam hal konsumsi dan pendapatan. Selain itu, kemiskinan merupakan masalah multisektoral, multiregional, dan multigenerasi yang memerlukan penanganan terpadu, berkelanjutan, dan pendapatan inklusif harus dibenahi. Upaya Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Medan yang dituangkan dalam Pasal 14 Ayat 5 Perda Kota Medan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: BANSOS (Bantuan Sosial), BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah bentuk bantuan sembako, Bantuan Kesehatan, Bantuan pendidikan, Bantuan perumahan, Bantuan peningkatan dan keterampilan, Bantuan untuk modal usaha, Bantuan keamanan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldino, N. (2021). *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) (Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Amalia, A. (2017). Pengaruh pendidikan, pengangguran dan Ketimpangan gender terhadap kemiskinan di Sumatera utara. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 324-344.
- Deo, S. F., Apriliani, Z., Anshori, M. Z., & Rangkuty, D. M. (2023). Studi Kajian Kemiskinan, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 1(4), 178-186.
- Hakim, A., Rahmani, N. A. B., & Harahap, R. D. (2024). Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kawasan Danau Toba. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 419-433.
- Lubis, S. A. (2019). *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Manullang, A., Pasaribu, R., Nabillah, R., Maipita, I., & Rinaldi, M. (2024). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara. *Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(2), 764-772.
- Nainggolan, E. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara (2010-2019). *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya: Penelitian Ilmu Manajemen*, 6(2), 89-99.
- Nur, L., Tanjung, I. S., Pane, M. R., Hidayat, R., & Ulandari, S. (2022). Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Sumatera Utara. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 872-879.
- Ramadhani, H., Safitri, N. A. N., Nasution, W., & Nasution, J. (2022). Tingkat kemiskinan di wilayah Kota Medan serta solusi pemerintah dalam menanganinya. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(4), 34-45.
- Rambe, V. S. (2019). *Peran Dinas Sosial Dalam Melakukan Bimbingan tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli sedang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. *Cermin: jurnal penelitian*, 6(1), 64-77.
- Siregar, O. K. (2020). PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA: Oktarini Khamilah Siregar; Putra Alfi Ramadhan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 10(1), 88-100.
- Sitanggang, E., Syahrani, D., Indriani, S., Nugrahadi, E., & Rinaldi, M. (2024). Pengaruh Tingkat Inflasi, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2021. *Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 216-225.
- Sitio, F. M., Silalahi, H. H. B., Naibaho, H. S. D., Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2024). ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN, KEMISKINAN, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA: SUATU TINJAUAN LITERATUR. *PROMOSI: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (e-Journal)*, 12(2).

Tambunan, B. A. Y., Silaban, E., Harahap, I., Maipita, I., & Rinaldi, M. (2024). Analisis Pengaruh PDRB, Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2020. *Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(2), 452-465.